

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Landasan hukum penguasaan negara terhadap sumberdaya alam diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disana dijelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah pertambangan mineral, negara sebagai kekuasaan tertinggi, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di bidang pertambangan, dengan demikian pemerintah mempunyai kebebasan dalam menentukan pihak mana saja yang diperbolehkan untuk mengusahakan sumber daya alam tersebut.¹ Adapun pengertian pertambangan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Dengan hadirnya usaha pertambangan dapat memberikan sejumlah dampak positif bagi negara, yakni meningkatkan pendapatan negara,

¹Salim H.S, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 61.

menciptakan lapangan pekerjaan, dan mempercepat pembangunan nasional.² Pada sisi lain kehadiran usaha pertambangan juga dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hidup, diantaranya adalah kerusakan bentang alam, erosi, dan sedimentasi, hilangnya kesuburan tanah, dan pencemaran air”.³

Kabupaten Landak yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, adalah salah satu kabupaten yang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar, satu dari potensi tambang yang dimiliki adalah pertambangan emas. Kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Landak tidak hanya dikelola oleh perusahaan, tetapi juga dikelola oleh masyarakat sekaligus pelaku Pertambangan Emas Ilegal (PETI). Kegiatan PETI banyak dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga rentan menimbulkan kerusakan lingkungan DAS. Adapun pengertian kerusakan lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup bahwa Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Bupati Kabupaten Landak Adrianus Asia Sidot mengatakan, banyak pertambangan emas tanpa izin beroperasi di Kabupaten Landak, umumnya berada di sekitar sungai. Pertambangan tersebut tidak hanya

²Marina Ika Sari, Dampak Positif dan Negatif Industri Pertambangan di Indonesia, hlm.

1, http://www.kompasiana.com/marinaikasari/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-di-indonesia_5528d386f17e61780e8b457a , diakses 27 april 2016.

³ Hadin Muhjad. M., 2015, *Hukum Lingkungan*, Cetakan Pertama, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.148.

menyebabkan kerusakan pada DAS tetapi juga mengakibatkan air sungai tercemar, akibatnya air sungai tidak dapat digunakan oleh masyarakat.⁴

Kerusakan DAS akibat kegiatan PETI juga terjadi di Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, pertambangan tersebut beroperasi di hulu sungai Menyuke, sebagai akibatnya banyak terjadi kerusakan lahan di sekitar lingkungan DAS Menyuke, terjadi banjir akibat pendangkalan dan penyempitan badan sungai akibat endapan lumpur dan pasir. Selain kerusakan lingkungan, dampak lainnya adalah pencemaran pada sungai membuat masyarakat yang bermukim di dekat aliran Sungai Menyuke tidak lagi menggunakan air sungai karena takut dengan dampak kesehatan yang ditimbulkan. Melihat kondisi lingkungan yang rusak sangatlah mengkhawatirkan sehingga dapat menimbulkan bencana dikemudian hari, bencana banjir yang pernah melanda Kecamatan Menyuke pada tahun 2014 silam, setidaknya merendam tiga desa yang berada di sepanjang aliran Sungai Menyuke, tiga desa tersebut adalah Desa Songga, Desa Ansang, dan Desa Darit. Banjir terparah terjadi pada Desa Darit, Desa Darit sebagai pusat ekonomi di Kecamatan Menyuke mengalami kelumpuhan, akibatnya kegiatan masyarakat menjadi terganggu. Peristiwa tersebut terjadi setelah hujan deras mengguyur Kecamatan Menyuke dan sekitarnya.⁵ Peristiwa bencana banjir sejatinya tidak hanya sekali terjadi setidaknya ketika musim penghujan tiba

⁴*Harian Kompas Rabu*, Marak, Pertambangan Emas di Kabupaten Landak, hlm. 1, <http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=2799>, diakses 11 Maret 2016

⁵*Zaenal Abidin*, Menyuke Landak Diterjang Banjir dan Tanah Longsor, 4 Rumah Rusak, hlm.1, <http://antarakalbar.com/berita/328629/menyuke-landak-diterjang-banjir-dan-tanah-longsor-4-rumah-rusak>, diakses 1 April 2016

Kecamatan Menyuke sudah menjadi langganan banjir, permasalahan ini terjadi disebabkan oleh kegiatan pertambangan emas ilegal.

Permasalahan lingkungan akibat kegiatan PETI di Kecamatan Menyuke sudah lama terjadi, hingga sekarang persoalan tersebut belum juga dapat diselesaikan. Masyarakat menilai belum ada tindakan serius yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak dalam menangani kerusakan lingkungan akibat kegiatan PETI sehingga masyarakat khawatir dengan kondisi lingkungan yang rusak. Meskipun jumlah pelaku kegiatan PETI di Kecamatan Menyuke sudah berkurang, namun Pemerintah Kabupaten Landak hingga sekarang belum mampu menangani kegiatan PETI secara tuntas. Pemerintah Kabupaten Landak diharapkan untuk dapat melakukan penertiban terhadap pelaku kegiatan PETI, di samping juga melakukan pemulihan lingkungan pada DAS Menyuke.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis melakukan penelitian hukum yang berjudul “Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat?

2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai kendala yang dihadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas Ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum lingkungan dan hukum pertambangan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, khususnya Badan Lingkungan Hidup, dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak dalam melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan emas ilegal.
 - b. Pelaku usaha pertambangan emas ilegal dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan.

E. Keaslian penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berkaitan dengan tema ini ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yaitu:

1. Disusun oleh : Agustinus Fransiskus San
- NPM : 08059954
- Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Penelitian Tahun : 2012
- Judul : Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran
Lingkungan Hidup Sebagai Akibat Pertambangan
Rakyat di Kecamatan Palu Timur Kota Palu.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat pertambangan rakyat di Kecamatan Palu Timur Kota Palu?
- 2) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum yang diakibatkan oleh pertambangan rakyat di Kecamatan Palu Timur Kota Palu?

b. Hasil Penelitian

- 1) Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat pertambangan rakyat di Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur Kota Palu belum berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Palu hanya melakukan sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan saja, dan belum melakukan upaya penertiban pertambangan emas ilegal di Kecamatan Palu Timur;
- 2) Penegakan hukum belum dilaksanakan dengan baik disebabkan karena adanya hambatan-hambatan sebagai berikut :
 - a) Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tidak dengan sungguh-sungguh maksudnya banyak dari oknum-oknum yang ikut memanfaatkan pertambangan rakyat di Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur;
 - b) Kurangnya koordinasi yang baik oleh pemerintah daerah di awal-awal pertambangan sehingga penambang emas ilegal semakin banyak dan terus berlangsung;
 - c) Terbatasnya sosialisasi peraturan maupun undang-undang dari pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami pentingnya suatu perijinan dari bidang pertambangan, selain itu tingkat pendidikan yang relatif rendah menjadi sebuah kendala dalam melakukan sosialisasi.

2. Disusun oleh : Delvine Valentine Imakotta

NPM : 09 05 10041

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penelitian Tahun : 2013

Judul : Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Sebagai Akibat Pertambangan Pasir Pantai
di Kabupaten Merauke.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke?
- 2) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke?

b. Hasil Penelitian

- 1) Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke belum berjalan optimal sesuai dengan Ketentuan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
- 2) Upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke terbatas pada penanaman pohon bakau, pemerintah konsisten untuk tidak memberikan izin melakukan pertambangan pasir pantai, pembuatan tambak ikan dari lahan bekas galian dan sosialisasi yang diberikan kepada pelaku tambang. Hal penting yang harus dilakukan tetapi tidak dilaksanakan adalah belum ada tindakan tegas dari

pemerintah Kabupaten Merauke untuk menertibkan pelaku tambang pasir ilegal;

- 3) Terkait pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke ada kendala-kendala yang dihadapi terutama pada pemilik hak ulayat, pengusaha-pengusaha nakal dan dari pelaku tambang yang kurang memupuk kesadaran akan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Disusun oleh : Manda Serevina Fransisca Putrid Hutagaol
 NPM : 10 05 10355
 Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Penelitian Tahun : 2014
 Judul : Peran Kantor Pelayanan Perizinan
 Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap
 Pertambangan Rakyat di Kabupaten Sleman.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran kantor pelayanan perizinan dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan rakyat di Kabupaten Sleman?
- 2) Apakah yang menjadi hambatan atau kendala dari kantor pelayanan perizinan dalam melakukan pengawasan terhadap Pertambangan rakyat di Kabupaten Sleman?

b. Hasil Penelitian

- 1) Kantor pelayanan perizinan tidak lagi berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten

Sleman. Hal ini dikarenakan kegiatan pertambangan rakyat telah dihentikan pasca erupsi gunung merapi tahun 2010. Kegiatan pertambangan rakyat kemudian dilakukan melalui normalisasi daerah aliran sungai. Pengawasan terhadap kegiatan normalisasi daerah aliran sungai dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup, dan Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral;

- 2) Dalam kegiatan normalisasi daerah aliran sungai pengawasan dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup, dan Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral. Pengawasan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut menghadapi kendala, sehingga tidak dapat dilakukan secara optimal. Dalam melakukan pengawasan Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral, dan Kantor Lingkungan Hidup terkendala pada jumlah personil yang kurang memadai

Penelitian penulis tentang “Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat” berbeda dengan penelitian di atas dalam hal fokus persoalan yang diteliti. Fokus permasalahan hukum penulis pertama mengenai penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat pertambangan rakyat, penulis kedua berfokus pada pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir pantai, dan penulis ketiga berfokus pada peran kantor pelayanan perizinan dalam pengawasan terhadap

pertambangan rakyat. Sedangkan fokus penulis ada pada masalah pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian pertambangan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Kerusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
3. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Sungai adalah alur atau wadah air alam dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan. Pasal 1 Angka 1 PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

5. Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, bisa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung. (lambangnya AU, nomor atomnya 79, bobot atomnya 196, 9665).⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (Law In Action) dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber terkait pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dengan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang digunakan sebagai referensi penunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

⁶Arti Kata Emas-Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id/emas>, diakses 21 September 2016

- 
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batu Bara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4959;
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5110;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111;

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580;
- i) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove;
- j) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan Dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.

2) Data Sekunder, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat dan pendapat hukum dari Kepala dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak dan Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data-data dengan mempelajari regulasi yang terkait, buku-buku literature dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

5. Sampel

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak, Andi Ali, bahwa semua kecamatan di Kabupaten Landak dengan jumlah keseluruhan adalah 13 kecamatan mengalami kerusakan lingkungan yang sama akibat kegiatan pertambangan emas ilegal.⁷ Penulis mengambil dua pelaku kegiatan pertambangan emas ilegal secara random yang kegiatannya berada di Kecamatan Menyuke. Hal tersebut dikarenakan karakteristik kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal antara kecamatan satu dengan yang lainnya adalah sama.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden dalam penelitian ini :

⁷ Wawancara dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak, Andi Ali, 20 September 2016

- 1) Ma Ikko, pelaku PETI;
- 2) Karocak, pelaku PETI.

b. Narasumber

- 2) Rudolf Agustinus, Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;
- 3) Benediktus Ronald, S. Si., Staf Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;
- 4) Drs. Andi Ali, M. Si., Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak;
- 5) Andi, ST., Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.⁸

⁸Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10